

Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Kuala Ba'u Kabupaten Aceh Selatan *Analysis of Fisherman Community Empowerment in Kuala Ba'u Village, South Aceh Regency*

Correspondence

Name: Dewi Fitriani

Email: Dewi130700@gmail.com

Dewi Fitriani ^{1*}, Muhammad Arif Nasution¹

¹Program Studi Sumber Daya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Teuku Umar

Abstrak

Studi tentang masyarakat nelayan sebagian besar berfokus pada aspek sosial ekonomi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat kita yang sangat intensif didera kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk merancang strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan statistik deskriptif, dan AHP terdiri dari lima kriteria yaitu, kriteria ekonomi, sosial, teknologi, kelembagaan dan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis AHP kriteria kelembagaan (22%) menjadi prioritas utama diikuti ekonomi (22%), sosial (21%), lingkungan (20%) dan teknologi (15%). Strategi awal yang diusulkan yaitu membentuk lembaga kemasyarakatan yang bergerak pada sektor ekonomi misalnya koperasi masyarakat yang mengelola sebagian dari dana desa, langkah selanjutnya adalah pembenahan pada aspek sosial untuk meminimalisir dampak konflik yang dapat terjadi dalam pengelolaan lembaga keekonomian yang dibentuk sebelumnya, kemudian membentuk karakter peduli lingkungan dan sadar teknologi agar strategi pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dapat berkelanjutan dan berkembang sesuai perkembangan teknologi.

Kata kunci: Aceh Selatan, masyarakat pemberdayaan.

Abstract

Studies on fishing communities mostly focus on socio-economic aspects. The results of this study show that the fishing community is one of the social groups in our society that is very intensively affected by poverty. This research aims to design a strategy for community empowerment. This research uses observation, documentation, and interview methods. The analysis used in this research is a descriptive statistical approach, and AHP consists of five criteria, namely, economic, social, technological, institutional, and environmental criteria. Based on the results of the AHP analysis, institutional criteria (22%) are the main priority, followed by economic (22%), social (21%), environmental (20%) and technological (15%). The initial strategy proposed is to form social institutions that operate in the economic sector, for example, community cooperatives that manage part of village funds, the next step is to improve the social aspect to minimize the impact of conflicts that can occur in the management of previously established economic institutions, then form an environmentally caring character. and be aware of technology so that the established community empowerment strategy can be sustainable and develop according to technological developments.

Keywords: community, empowerment, South Aceh.

Pendahuluan

Studi tentang masyarakat nelayan sebagian besar berfokus pada aspek sosial ekonomi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat kita yang sangat intensif didera kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu,

kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kawasan pesisir (Hasyim, D et al. 2023).

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Realitasnya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan (Delfriana et al. 2023).

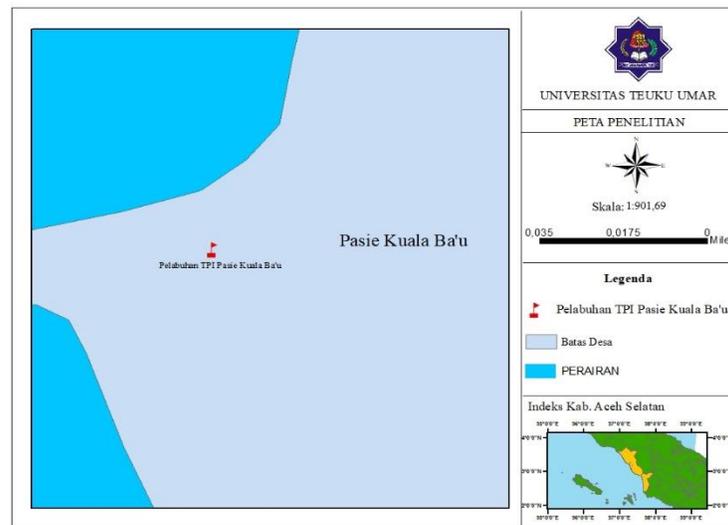
Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang bersumber pada kekuatan modal sosial masyarakat sendiri telah terbukti dapat mengurangi sikap selfish dan free rider, dan akhirnya cenderung lebih efektif mendorong ke arah pemanfaatan sumberdaya yang *sustainable* (Qodriyatun. 2013). Sejalan dengan prinsip ini, Departemen Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan berbagai program pembangunan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Sebagai contoh misalnya Program Pengembangan Perikanan Berbasis Budidaya (*Culture Based Fisheries, CBF*) dan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Secara umum, nelayan di Kuala Ba'u didominasi oleh nelayan tradisional, nelayan skala kecil dengan sarana penangkapan sebagian besar merupakan perahu motor dengan ukuran kecil. Hal ini sangat mempengaruhi hasil tangkapan dan secara langsung turut berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, di sisi lain tidak semua nelayan memiliki sarana alat tangkap. Jumlah masyarakat pesisir yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar di Kuala Ba'u.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui program-program intervensi pembangunan, seperti Program PEMP, Departemen Kelautan dan Perikanan. Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan ekonomi, peningkatan SDM, dan penguatan kelembagaan sosial. Pendekatan kelembagaan sebagai basis dalam kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memperbesar kemampuan sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat, (2) meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan, (3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan (4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama. Atas dasar pandangan ini, berbagai jenis kelembagaan sosial ekonomi yang dibentuk melalui Program PEMP seperti di atas merupakan modal pembangunan yang sangat berharga bagi masyarakat nelayan (M. Baga, 2013). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk merancang strategi pemberdayaan masyarakat Desa Kuala Ba'u kabupaten Aceh Selatan.

Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2022 di Desa Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Gambar 1). Penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode observasi adalah pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan ke lokasi penelitian. Sedangkan dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan analisis pada dokumen yang bersumber dari buku, jurnal, laporan. Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden penelitian berdasarkan kuesioner yang telah dibuat (Ediyanto, 2018).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik deskriptif, *Indepth Interview* dan AHP. *Indepth Interview* merupakan proses menggali informasi secara mendalam mengenai topik penelitian, yaitu mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Kuala Ba'u. Sesuai dengan tujuan penelitian, *Indepth Interview* dilakukan guna mengetahui strategi-strategi yang tepat dan perlu dilakukan pada program pemberdayaan selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Process AHP Setelah diketahui strategi-strategi yang tepat berdasarkan hasil *Indepth Interview*, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode AHP guna menentukan prioritas strategi kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. Dalam prosesnya, AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi serta logis yang bergantung pada imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan. Saaty (1993) mengatakan bahwa AHP dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks menjadi suatu hirarki. Yang dimaksud masalah kompleks adalah masalah yang memiliki berbagai kriteria (multikriteria), belum memiliki struktur yang jelas, tidak ada kepastian pendapat dari banyak pengambil keputusan, serta tidak memiliki data yang akurat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Alwen benti (2021), data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan sumber data kepada pengumpul data. Metode wawancara dan kuesioner dipergunakan untuk memperoleh data. Data yang diambil dari kuesioner akan disebarkan pada Nelayan di Desa Kuala Ba'u.

Analisa Hirarki adalah proses untuk menentukan strategi kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kuala Ba'u, dimana variabel-variabel dimasukkan dalam suatu susunan *hierarki*, yang memberi pertimbangan numerik pada pertimbangan subyektif tentang relatif pentingnya variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas relatif yang tertinggi. Langkah paling awal dalam penggunaan proses analisis hierarki adalah merinci permasalahan kedalam elemen-elemennya dan mengatur bagian dari elemen-elemen kedalam bentuk hierarki (Desy, 2018).

Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif model ini ada empat komponen analisis yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan membuat skla perbandingan dan matrik berpasangan dengan formulasi rumus sebagai berikut:

1. Formulasi dengan menggunakan rata-rata aritmetik
 - Menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom (Nkj).

$$Nkj = \sum_{k=1}^n aij(k)$$

Keterangan:

Nkj : Nilai kolom ke j

aij : Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i dan kolom j

n : jumlah elemen

- Membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi (Ndi_j).

$$Ndi_j = \frac{aij}{Nkj}$$

Keterangan:

Ndi_j : Nilai setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada baris i dan kolom j

Aij : Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i dan kolom j

Nkj : Nilai kolom ke j

- Vektor prioritas dari setiap elemen, diperoleh dengan merata-ratakan nilai sepanjang baris

$$(Vpi).Vpi = \sum_{j=1}^n \frac{Ndi_j}{\sum_{j=1}^n Ndi_j}$$

Keterangan:

Vpi : Vektor prioritas dari elemen i

Ndi_j : Nilai setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada baris i dan kolom j

2. Formulasi dengan menggunakan rata-rata geometrik

- a. Perkalian baris (Zi) dengan menggunakan rumus.

$$Zi=n \sqrt{\pi aij(k)}$$

Keterangan :

Zi : Perkalian baris

n : Jumlah elemen

aij : Nilai entri setiap matriks pada baris i dan kolom j

k : Kolom pertama

- Perhitungan vektor prioritas atau vektor ciri (*eigen vector*)

$$eVP_i = \frac{\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}(k)}}{\sum_{i=1}^n \left[\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}(k)} \right]} \cdot \frac{Z_i}{\sum_{i=1}^n Z_i}$$

Keterangan :

VP_i : Vektor Prioritas elemen i

Z_i : Perkalian baris I

3. Rasio konsistensi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Perhitungan akar ciri atau nilai eigen (*eigen value*) maksimum (α maks) dengan rumus :

$$VA = a_{ij} \times V_p \text{ dengan } VA = (V \cdot a_{ij})$$

Dimana: VA adalah vektor antara

$$VB = \frac{VA}{VP} \text{ Dengan } VB = VB_i$$

Dimana: VB Adalah nilai eigen

ma

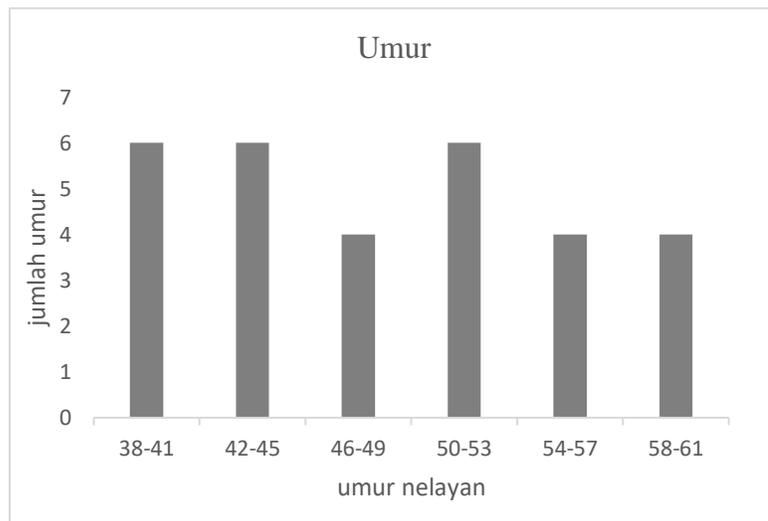
$$X = \frac{\sum_{i=1}^n VB}{n}$$

Hasil

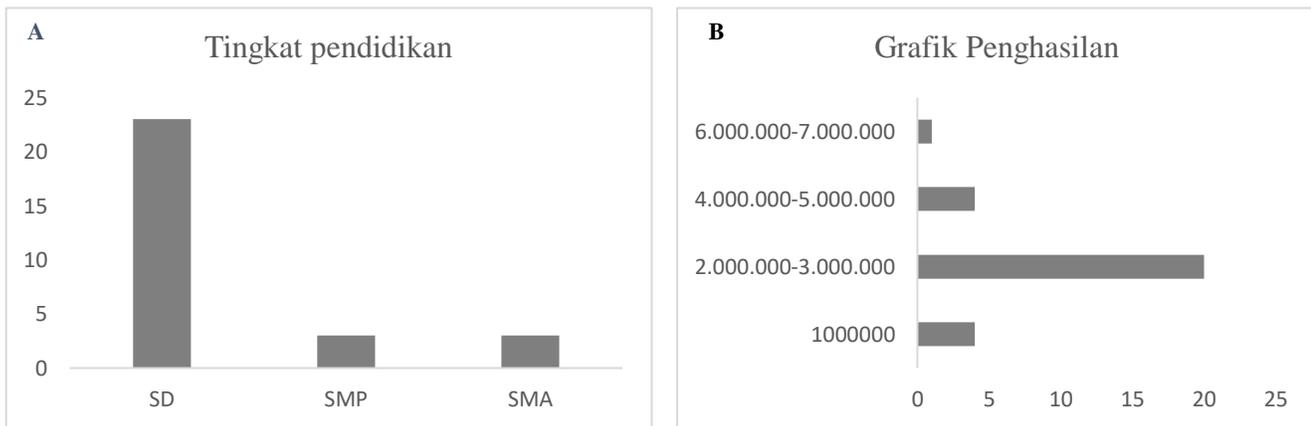
Karakteristik Responden

Jumlah nelayan di Desa Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ada 50 orang dan yang menjadi responden sebanyak 30 orang. Selebihnya hanya bekerja sampingan sebagai nelayan. Dari ke 30 nelayan tersebut tidak semuanya berasal dari Desa Kuala Ba'u ada juga yang berasal dari desa lain dan menjadi nelayan di kawasan tersebut.

Kuisisioner yang dibagikan kepada nelayan terdiri dari lima kriteria yaitu, kriteria ekonomi, sosial, teknologi, kelembagaan dan lingkungan. Karakteristik umur responden di dominasi umur 38-41, 42-45 dan 50-53 tahun (Gambar 2). Karakteristik pendidikan di dominasi tingkat sekolah dasar (Gambar 3A), serta sebagian besar jumlah penghasilan 2-3 juta rupiah dan masih di bawah UMR yang mana UMR Aceh adalah sebesar 3,41 juta (Gambar 3B).



Gambar 2. Grafik umur nelayan

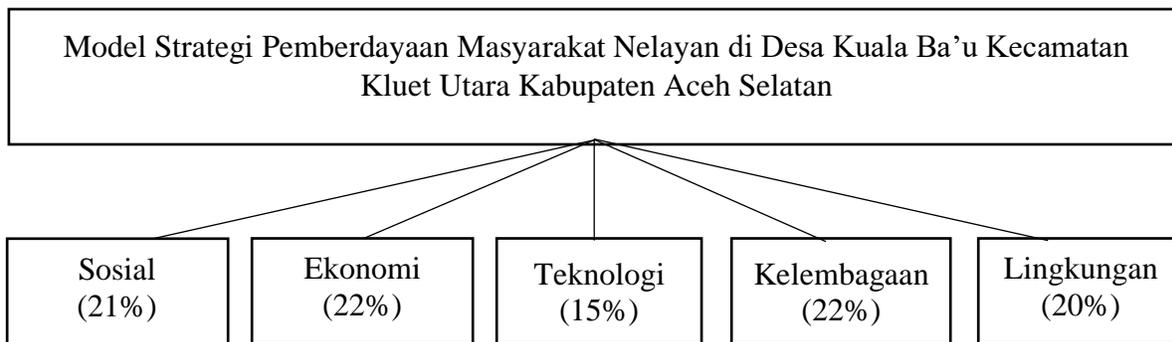


Gambar 3. (A) Grafik tingkat pendidikan dan (B) penghasilan responden

Pembahasan

Kriteria Pemberdayaan

Berdasarkan hasil analisis AHP diperoleh lima strategi perbaikan program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, yaitu model pemberdayaan sosial, ekonomi, teknologi, kelembagaan dan lingkungan. Selanjutnya melalui analisis AHP, diperoleh urutan prioritas strategi, yaitu 1) kelembagaan, 2) Ekonomi, 3) sosial 4) lingkungan 5) teknologi, Gambar 4.



Gambar 4. Hirarki dan nilai prioritas model pemberdayaan masyarakat Nelayan

1. Kelembagaan

Prioritas pertama strategi pemberdayaan masyarakat nelayan adalah penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat ini merupakan bagian dari peran pemerintah dari *co-manajemen* dalam memberikan pelayanan bagi peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir, serta manajemen usaha perikanan. Hal terpenting dari kegiatan ini adalah mendorong modal sosial masyarakat pesisir agar lebih berdaya dan mandiri dalam menggerakkan aktivitas perekonomiannya. Pembinaan dan pelatihan diharapkan dapat menjadi *trigger* (pemicu) tumbuh kembangnya inovasi usaha perikanan sehingga tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah semata, tetapi potensi sosial ekonomi yang ada dapat ditumbuh-kembangkan dalam mendukung pengembangan usaha perikanan secara berkelanjutan.

Program PEMP mulai tahap inisiasi dan institusional telah berupaya membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) dan kelompok usaha bersama (KUB) ditingkat desa serta membangun koperasi LEPP-M3 ditingkat kawasan pesisir. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Menurut Karasasmita Ginanjar (1996: 144) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah memampykan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

2. Ekonomi

Prioritas kedua adalah potensi sosial ekonomi yang ada dapat ditumbuh-kembangkan dalam mendukung pengembangan usaha perikanan secara berkelanjutan. Di dalam aspek ekonomi terdapat dua alternatif yang menjadi prioritas yaitu identifikasi dampak kegiatan perikanan yang terjadi pada *direct stakeholder*. Pentingnya mengidentifikasi dari kegiatan *direct* dan *indirect stakeholder* yang dibedakan adalah agar klasifikasinya bisa terlihat jelas dampak dari kegiatan tersebut secara ekonomi memberikan sumbangsih seberapa besar. Pada *direct stakeholder* manfaat dapat langsung dirasakan dari kegiatan perikanan tersebut, dan dampaknya pun akan mengena langsung karena berhadapan langsung pada ekosistem ataupun oleh penggunaan sumberdaya perikanan itu sendiri. Pihak-pihak yang termasuk *direct stakeholder* antara lain nelayan. Sedangkan *indirect stakeholder* terkena dampak ekosistem dan sumberdaya perikanan dan kelautan tetapi tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari kegiatan perikanan, seperti pengusaha ikan, wisatawan. Evaluasi terhadap nilai ekonomi dan

manfaat dari sumber daya perikanan perlu pengkajian lebih mendalam agar dapat menghasilkan keoptimalan dalam penggunaan sumberdaya perikanan dengan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Menurut (Nikijuluw, 2001) mengemukakan bahwa masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir, dimana sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Secara operasional, masyarakat pesisir hanya difokuskan pada kelompok nelayan, pedagang dan pengolah ikan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dinilai dengan indikator-indikator pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

3. Sosial

Prioritas ketiga adalah sosial nelayan yaitu kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Adapun alternatif yang menjadi prioritas dalam aspek sosial adalah meningkatkan serta memberikan pengetahuan tentang pengelolaan perikanan kepada masyarakat nelayan. Dikarenakan nelayan adalah stakeholder yang berhubungan langsung dengan objek, Oleh karenanya setiap nelayan perlu mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai daerah ekosistem tersebut guna mengetahui secara detail mengenai seluk beluk medan yang mereka hadapi setiap harinya. Jika nelayan sudah diberikan pengetahuan yang jelas dan sudah adanya pemahaman oleh nelayan maka diharapkan nelayan dapat menjaga keberlangsungan ekosistem sekaligus tempat kerja mereka agar ekosistem tersebut dapat terjaga dan hasilnya bisa terus mereka nikmati, bahkan dapat mengalami peningkatan kedepannya. Kemudian kebijakan pengelolaan perikanan hendaknya disesuaikan dengan budaya setempat. Karena setiap daerah memiliki masyarakat dengan budaya yang berbeda, hal yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Perlunya identifikasi awal mengenai budaya dan tradisi masyarakat sekitar guna kebijakan tersebut tepat sasaran. Kemudian agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

4. Lingkungan

Prioritas keempat adalah lingkungan masyarakat nelayan adalah dampak apa saja yang pernah di alami oleh nelayan di Desa Kuala Ba'u. Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat terbuka terhadap perubahan dan memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam. Sekalipun demikian masalah kemiskinan masih mendera sebagian warga masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi ditengah-tengah mereka memiliki hasil kekayaan sumberdaya pesisir dan lautan yang melimpah ruah.

5. Teknologi

Strategi prioritas kelima adalah pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan. Teknologi yang digunakan oleh masyarakat nelayan di Desa Kuala Ba'u masih bisa dibilang sangat tradisional dan sederhana karena itu produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan menjadi lemah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi secara terintegrasi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi. Namun demikian upaya pemberdayaan masyarakat melalui

perbaikan teknologi harus juga mempertimbangkan sifat, karakteristik, kemampuan dan kesiapan masyarakat pesisir agar implemetasi teknologi dapat berkelanjutan.

Strategi pemberian bantuan peralatan nelayan dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu kait, benang pancing, pemberat, batang pancing roda pancing, indikator gigitan dan jaring ikan. Alat tangkap juga sangat diperlukan untuk meningkatkan keuntungan para nelayan, dan alat tangkap yang di berikan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para nelayan tersebut sehingga hasil yang didapatkannya juga menjadi maksimal.

Kesimpulan

Kriteria kelembagaan dan ekonomi merupakan aspek yang perlu dibenahi terlebih dahulu dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, setelah itu perlu dilakukan pembenahan di bidang/aspek sosial pada tahap selanjutnya diikuti dengan aspek lingkungan dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Alwen bentri, 2021 Dan Sugiyanto *Data Primer merupakan studi dengan menganalisi data yang berasal dari studi primer jurnal pengabdian masyarakat. vol 9*
- Ded, M.& Desy, R.M. (2018). *Penerapan metode analitycal herarchy proses (AHP) untuk penentuan kolektor terbaik di Pt anugrah argon medica bogor. Jurnal (teknoIS). Vol 8.no 1 hal 61-77.*
- Delfriana, ayu. (2023).*Hubungan nelayan terhadap perekonomian ekosistem laut di pantai labu kecmatan paluh sibaji. Jurnal pengabdian masyarakat.vol 4*
- Kariman. & Ediyanto. (2018). *Peran muhammadiyah dalam pemberdayaan masyarakat kokoda di kota sorong. Jurnal noken. Volume 4. Hal 1.*
- Muhammad, Z,m,s. Abdurahman, S. Suratno, A. Muhammad, M., & Daud Hasyim.(2023). *Pendampingan rumah tangga nelayan dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan kota Ternate.jurnal Barifola JPM.vol 4.*
- Nikijuluw, V.P.H. 2001. *Potensi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu. Makalah. Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut, Institut Pertanian Bogor, Bogor.*
- Qodriyatun. 2013 T. F. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Swot: Strategi Pengembangan Sdm, Strategi Bisnis, Dan Strategi Msdm (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2(5), 619–629. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i5.588>*
- Saaty, T.L. (1994) *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process. RWS Publications, Pittsburgh*
- Sri nurhayati, Qoddriatun. (2013). *Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di kota Batam melalui pemberdayaan masyrakat. Jurnal aspirasi vol 4, no 2.*

Sitti, B, B. Lala, M. K & M.Baga.(2013). *Strategi peningkatan mutu program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal manajemen pembangunan daerah. Vol 5.no1.*

Wiwik, M. Vinni, W.S., & Alwen, Benti. (2021). *Peran dalam menerapkan kurikulum 2013 di sekolah.jurnal ilmu pendidikan, vol 5. 6.hal 471-4776*